

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Bohari, *Pengawasan Keuangan Negara*, Rajawali Press, Jakarta, 1992.
- Dina Susiani, “*Hukum Pemerintahan Daerah*”, Tahta Media, Surabaya, 2025.
- Jum Anggriani, *Hukum Administrasi Negara*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012.
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram, 2020
- Mega Rochka, *Kawasan Tapa Rokok Di Fasilitas Umum*, Uwais Inspirasi Indonesia, Ponorogo Jawa Timur, 2019.
- Merna Cinthia, *Kewenangan Pemerintah Dalam Hukum Administrasi Pemerintahan*, Yogyakarta, 2023.
- Miriam Budiarjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2007.
- Nurmayani, *Hukum Administrasi Daerah (Buku Ajaran)*, Bandar Lampung, Universitas Lampung, 2009.
- Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2008.
- Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Perizinan*, Surabaya: Yuridika, 1993

Ridwan H.R, *Hukum Administrasi Negara* (Edisi Revisi - Cetakan ke-9),
Rajawali Press, Jakarta, 2016.

Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Edisi Revisi, RajaGrafindo Persada,
Jakarta, 2020.

Rusadi Kantaprawira, *Hukum dan Kekuasaan*, Universitas Islam Indonesia,
Yogyakarta, 1998.

Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.

Sujanto, *Otonomi Daerah Yang Nyata Dan Bertanggung Jawab*, Sinar
Grafika, Jakarta, 1990.

Sujanto, *Beberapa Pengertian Di Bidang Pengawasan*, Jakarta, Ghalia
Indonesia, 1986.

Suparto Wijoyo, *Karakteristik Hukum Acara Peradilan Administrasi*
(Peradilan Tata Usaha Negara) Edisi Kedua, Airlangga University
Press, Surabaya, 2005.

Victor M, Situmorang, *Aspek Hukum Pengawasan Melekat Dalam Lingkungan*
Aparatur Pemerintah, Jakarta, Rineka Cipta, 1993.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 24 Tahun 2012 tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR).

Peraturan Wali Kota Padang Nomor 9 Tahun 2024 Tentang Perhitungan Nilai Sewa Reklame, Jenis dan Bentuk Pengecualian Objek Pajak Reklame serta Tata Cara Penyelenggaraan Reklame.

Peraturan Walikota Padang 25 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 24 Tahun 2012 tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR).

Keputusan Walikota Padang Nomor 389 Tahun 2024 tentang tempat lainnya Kawasan Tanpa Rokok

C. Skripsi, Disertasi dan Jurnal

Farah Syahreza, “wewenang sebagai instrumen penyelenggaraan pemerintahan dalam sistem negara hukum”, *jurnal hukum, pendidikan, dan sosial keagamaan*, Vol. 2, No. 2, 2023.

Ni Made Musiyani Anjasmari dan Muhammad Bakhtiar, *Implementasi Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2018 tentang Larangan Penyelenggaraan Reklame Rokok dan Produk Tembakau pada Media Luar Ruang dan Jalan Protokol di Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan*, Balangan, SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah, Vol. 3, 2024.

Melli Herfina dan Reta Purnama Sari, *Analisis Penerapan Perhitungan Dan Pelaporan Pajak Reklame Pada Badan Pendapatan Daerah Kota Padang*, Padang, Jurnal Akademi Akuntansi Indonesia Padang, Vol. 3, No. 2, 2023.

Miftahul Muhtadin, “Pengawasan Biro Hukum Pemerintahan Provinsi Riau Terhadap Lembaga Bantuan Hukum Dalam Memberikan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin Di Kota Pekanbaru”, *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, 2021.

Moh Gandra, Kewenangan Atribusi, Delegasi, Dan Mandat, *Jurnal Khazanah Hukum*, Vol. II, No. 3, 2020.

Zakiah Darajat, dkk, “Pelaksanaan Peraturan Kawasan Bebas Asap Rokok Darajat Pada Tempat Umum Sebagai Perwujudan Hak Atas Kesehatan Masyarakat, *Jurnal Penelitian Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Vol.III: No.2, 2013.

Zainab Ompu Jainah, “Penegakan Hukum dalam Masyarakat”, *Jurnal of Rural and Developmen*, Vol. 3, No. 2,

D. Website

Redo,J.(2024, 18 September), “Dugaan Maladministrasi Iklan Rokok di kota Padang: Ombudsman Temukan Pelanggaran”, <https://www.tvrisumbar.co.id/berita/detil/8005/dugaan-mal-administrasi-iklan-rokok-di-kota-padang:-ombudsman-temukan-pelanggaran.html>.

Chandra Iswarno, (2023, 17 September), “*Ombudsman Sumbar Ungkap Dugaan Maladministrasi dalam Penertiban Reklame Rokok di Kota Padang*”, <https://sumbar.suara.com/read/2024/09/17/185718/ombudsman-sumbar-ungkap-dugaan-maladministrasi-dalam-penertiban-reklame-rokok-di-kota-padang>.

Rifki Chandra, (2024, 17 September), “*Sebut Pemkot Padang Abai Tertibkan Reklame Rokok Ilegal, Ombudsman Sumbar Ungkap 11 Poin Temuan Investigasi!*”, <https://sumbar.suara.com/read/2024/09/17/182823/sebut-pemkot-padang-abai-tertibkan-reklame-rokok-ilegal-ombudsman-sumbar-ungkap-11-poin-temuan-investigasi>.

Rima Kurniati, (2024, 17 September 2024), “*Pemko Padang akan Tindaklanjuti Temuan Ombudsman Sumbar Soal Pengawasan Reklame Rokok*”, https://padang.tribunnews.com/2024/09/17/pemko-padang-akan-tindaklanjuti-temuan-ombudsman-sumbar-soal-pengawasan-reklame-rokok?utm_source=chatgpt.com.

Maulida, Abdillah, (2023), “*Ringkasan Penelitian Pengendalian Tembakau Tahun 2019 - 2023*”, https://www.researchgate.net/publication/369977459_Ringkasan_Penelitian_Pengendalian_Tembakau_2019-2023.

Redaksi, (2023, 5 Juni 2023), “*Iklan Rokok di Padang Kangkangi Perda KTR, Instansi Terkait Diminuta Tak Diam*”, <https://radarsumbar.com/s>

[umbar/padang/71918/iklan-rokok-di-padang-kangkangi-perda-ktr-
instansi-terkait-diminta-tak-diam/](#).

Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Republik

Indonesia, “*Apa saja sumber-sumber Pendapatan Daerah,*”

[https://djpk.kemenkeu.go.id/?ufaq=apa-saja-sumber-sumber-
pendapatan-daerah](https://djpk.kemenkeu.go.id/?ufaq=apa-saja-sumber-sumber-
pendapatan-daerah).

